

**IMPLEMENTASI PERDA NO 4 TAHUN 2022 TENTANG
PENGALIHAN ASET EKS-PNPM KE BUMDESMA DALAM
PENGEMBANGAN UNIT USAHA DI BUMDESMA MAKARYO
KECAMATAN LENGKONG**

**CAMELLIA RADITYANI FATMA
NIM. 232365201026**

Pembimbing 1 : Dr. H. Machwal Huda, M.Si.

Pembimbing 2 : Farichatun Nisa', S.IAN., M.KP.

Abstrak

Pembangunan ekonomi di tingkat desa merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah pusat, salah satu upaya yang dilakukan untuk memperkuat perekonomian desa adalah melalui pengelolaan sumber daya ekonomi secara mandiri. Sebagai bentuk partisipasi dalam pengembangan ekonomi lokal, BUMDesma didorong untuk memiliki kemandirian melalui pengelolaan aset yang ada. Salah satu bentuk kebijakan yang diterapkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Artikel ini menggunakan survei ahli untuk terlibat dalam studi komparatif yang pertama dan lebih komprehensif sehingga menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsi dengan menerapkan teori implementasi Edward. Fokus penelitian ini diambil berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Model George C. Edward III. 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama berjalan maksimal. Masih adanya kekurangan dalam variabel mengakibatkan pelaksanaan suatu kebijakan belum berhasil dilakukan. Sehingga masih dibutuhkan perbaikan di setiap sistemnya.

Kata kunci : Implementasi, Perda, Model George C. Edward III

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NO. 4 OF 2022
CONCERNING THE TRANSFER OF EX-PNPM ASSETS TO
BUMDESMA IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS UNITS IN
BUMDESMA MAKARYO, LENGKONG DISTRICT**

**CAMELLIA RADITYANI FATMA
NIM. 232365201026**

Supervisor : Dr. H. Machwal Huda, M.Si.

Co-supervisor : Farichatun Nisa', S.IAN., M.KP.

Abstract

Economic development at the village level is an important aspect in improving community welfare. Along with the development programs rolled out by the central government, one of the efforts made to strengthen the village economy is through independent management of economic resources. As a form of participation in local economic development, BUMDesma is encouraged to achieve self-reliance through the management of existing assets. One of the policies implemented is the Nganjuk Regency Regulation No. 4 of 2022 on the Transfer of Management of Community Revolving Fund Activities from the Former National Program for the Empowerment of Self-Reliant Rural Communities to a Joint Village-Owned Enterprise.

The research used in this research is descriptive research with qualitative approach. This descriptive study used because the researchers tried to photograph the events that occurred, the researchers did not provide treatment or manipulation, but describe a condition as it is. The focus of this study is based on the model of policy implementation presented by Model George C. Edward III. 4 (four) variables affecting the implementation of the policy namely communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures. The result of the research shows that the implementation of Nganjuk Regency Regulation No. 4 of 2022 on the Transfer of Management of Community Revolving Fund Activities from the Former National Program for the Empowerment of Self-Reliant Rural Communities to a Joint Village-Owned Enterprise has been maximal. In addition, there is still a lack of facilities and infrastructures in the delivery of information regarding park utilization permits. There is still a shortage in the variables resulting in the implementation of a policy can not be implemented maximally. So it still needs repairs in every system.

Keywords: *implementation, Nganjuk Regency Regulation, Model George C. Edward II*

